

Partai Demokrat di Ujung Tanduk

Kisruh di tubuh Partai Demokrat ini semakin memanas dan mengarah pada perpecahan antar kader Demokrat sendiri. Kasus M. Nazaruddin, Bendahara Umum PD bahkan telah menyeret nama-nama lain elite partai. Sebagai partai pemenang pemilu, para petinggi partai harus kerja ekstra agar kasus ini tidak berdampak pada perolehan suara nantinya.

Sejak kasus Wisma Atlet mencuat, banyak pihak berharap agar kasus ini secepatnya dituntaskan. Apalagi dikaitkan dengan nama PD serta keberadaan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina partai yang selama ini mendung-dungungkan gerakan pemberantasan korupsi. Tak ayal, KPK pun langsung mengambil sikap dengan mengeluarkan surat cecal terhadap M. Nazaruddin.

Sikap partai sendiri sudah jelas, dengan memberhentikan Nazaruddin sebagai pengurus partai. Walau banyak juga yang menyayangkan karena tidak diberhentikan sebagai anggota DPR. Tapi setidaknya langkah ini telah menunjukkan bahwa PD tidak akan main-main dengan kasus korupsi.

Hanya saja, menghindarnya M. Nazaruddin ke Singapura serta pro kontra antara kader dalam menyikapi kasus ini ternyata luput dari pengamatan SBY sebagai pembina partai. Situasi perpecahan di tubuh partai pasca pemecatan M. Nazaruddin tampaknya tak bisa terhindarkan.

Mampukah PD keluar dari persoalan ini? Apakah tanda-tanda perlawanan kader terhadap pembinanya menunjukkan PD berada dalam posisi sulit? Tentunya kita harus menunggu lagi langkah-langkah yang akan diambil para elite partai nantinya.



Monarki Jogja

Demokrasi di Indonesia kembali harus diuji dengan munculnya keinginan beberapa warga di Jogja agar Sri Sultan sebaiknya langsung ditetapkan saja sebagai gubernur tanpa harus melalui tahapan pilkada. Silang pendapat ini muncul setelah dalam rapat kabinet Presiden SBY menyinggung masalah sistem pemerintahan yang tidak boleh bertentangan dengan demokrasi, yakni monarki.

Pernyataan ini sontak memicu reaksi dari warga Jogja pendukung penetapan Sri Sultan sebagai Gubernur. Dari bentuk protes hingga munculnya relawan-relawan yang mendesak segera diadakannya referendum bagi warga Jogja.

Ditilik dari sisi demokrasi, tentu keinginan agar Gubernur Jogja langsung ditetapkan tentunya bisa mengusik rasa keadilan bagi daerah lainnya. Di mana kita tahu selama ini para gubernur, walikota, maupun bupati dipilih secara demokratis melalui pilkada. Apa jadinya jika salah satu daerah diberi keistimewaan dalam pengisian jabatan-jabatan politis.

Keinginan seperti itu tentu saja biasa di alam demokrasi. Dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi asas-asas demokrasi, perbedaan pendapat adalah mutlak adanya. Hanya saja perlu digarisbawahi, bahwa demokrasi juga mempunyai bingkai hukum yang harus ditaati bersama. Sepanjang semua pihak bisa menghormatinya itu sangat berpengaruh bagi eksistensi dari sebuah sistem demokrasi.

Jogjakarta menyimpan banyak kisah sejarah yang tak terpisahkan dengan republik ini. Tetapi sekali lagi, penghormatan



terhadap nilai-nilai historis tetap harus selaras dengan asas-asas demokrasi yang kita anut selama ini. Berikanlah penghormatan itu pada tempat yang semestinya tanpa harus mengorbankan bingkai negara kita.

Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Jogjakarta adalah batu ujian bagi demokrasi di Indonesia. Semua pihak bisa menjadikan ini sebagai bahan dalam mencari esensi demokrasi yang ideal dan sesuai dengan *taste* keindonesiaan kita bersama.

Peranan dari Sri Sultan sangat dibutuhkan guna mereduksi adanya pemahaman yang melenceng akan *diskursus* demokrasi monarki ini. Dan melihat dinamika persoalan ini, tak menutup kemungkinan isu seperti ini hendak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk pencapaian agenda politisnya. *Wallahu alam bishawab.*

